

Fenomena Pengunduran Diri Di Kalangan Pejabat Publik Jepang (Studi Tentang Budaya Politik Masyarakat Jepang Tahun 2007-2011)

Yusy Widarahesty*, Rindu Ayu

Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Al Azhar Indonesia,
Jl. Sisingamangaraja, Jakarta 12110

*Email Penulis : idunk_de@yahoo.com

Abstrak - Fenomena pengunduran diri dikalangan pejabat publik Jepang telah memberikan warna dalam budaya politik yang dimiliki bangsa Jepang. Fenomena tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai sikap yang dikenal dengan "kesatria politik" tersebut dikalangan pejabat publik Jepang. Sikap mundur tersebut telah menggambarkan bentuk tanggung jawab yang dianggap "kesatria" yang dimiliki dalam karakter berpolitik negeri sakura ini. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian literature yang bertujuan untuk melihat bagaimana sejarah terciptanya "budaya mundur" tersebut dan bagaimana Fenomena pengunduran diri dikalangan pejabat publik Jepang yang terjadi dari periode 2007-2011, yang dilihat melalui pendekatan kajian budaya (cultural studies) dengan menggunakan konsep budaya politik dan ideologi. Dari hasil analisis melalui kepustakaan, maka dapat disimpulkan bahwa Fenomena pengunduran diri yang dilakukan oleh kalangan pejabat publik Jepang, merupakan hasil dari "pengawetan selektif" terhadap nilai-nilai leluhur yang dilakukan oleh otoritas kuasa. Nilai-nilai tersebut kemudian terekam dalam ruang dan waktu yang terus berganti dengan wujud yang berbeda. Nilai tersebut terus berkembang dan bertahan sehingga menjadi sebuah ideologi yang dipercaya oleh masyarakat Jepang. Proses "pengawetan selektif" inilah yang kemudian tanpa disadari menjadi hegemony nilai bagi masyarakat Jepang, sehingga bagi siapapun yang mencoba melanggarnya akan berhadapan dengan "sanksi sosial" yang sangat berat. Ketika nilai ini sudah terekam dalam jejak panjang masyarakat Jepang kemudian dianggap sebagai nilai-nilai leluhur yang terus

"diawetkan", maka hukum yang berjalan adalah "sanksi sosial", karena ketika penghakiman masyarakat menjadi ampuh, maka penilaian umum (looking pretty for everyone) akan menjadi pertimbangan yang mutlak dan seakan tidak memberikan tempat pada pilihan yang lain, disitulah terjadi fenomena pengunduran diri yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pejabat publik Jepang.

Abstract - The phenomenon of resignation among Japanese public officials have given color to the Japanese political culture. The resignation attitudes have described a form of responsibility which is considered as a "knights" of the political character of the "Sakura" country. This research is specifically conducted to see how the history of the creation of a "resignation culture" and how the phenomenon of resignation among Japanese public officials that occurred from the period 2007-2011. This Research includes qualitative research with descriptive analysis. From the analysis through the literature methodology, it can be concluded that the phenomenon of resignation made by the Japanese public officials, was the result of "selective preservation" of the ancestral values by the power authority. These values then, recorded in space and time constantly changing with different forms. That Value continues to grow and survive to become an ideology that is trusted by the Japanese people. The process of "selective preservation" is then unwittingly become hegemony value for Japanese people, so for anyone who tried to break it will face a heavy "social sanctions". When the social sanction becomes effective, the general assessment (looking pretty for everyone) would

be considered absolute and seemingly did not give place to the other options, that's where the phenomenon occur resignation barrage by the Japanese public officials.

keywords - Phenomenon, Resignation, public officials, Japan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena pengunduran diri yang dilakukan oleh kalangan pejabat publik Jepang di abad modern, sering dikaitkan sebagai cerminan dari budaya politik Jepang yang menjadi perhatian baik dilingkungan domestik Jepang maupun internasional. Walaupun dalam teori politik, perilaku politik tidak selalu mencerminkan budaya bangsa, tetapi lebih sering dikaitkan dengan sebuah cara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai kepentingannya, namun menariknya dalam kasus pengunduran diri yang banyak dilakukan oleh pejabat publik Jepang ini, seringkali ditanggapi sebagai sebuah peristiwa yang “biasa” bagi masyarakat Jepang sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sudah “membudaya”.

Salah satu diantara cerita mengenai pengunduran diri yang dilakukan oleh pejabat publik Jepang yaitu cerita mengenai mundurnya perdana menteri Jepang Yukio Hatoyama, yang memenangkan pemilihan suara pada tahun 2009. Hatoyama adalah ketua umum dari partai *Democratic Party of Japan* (DPJ). Kemenangan Hatoyama juga dianggap sebagai kemenangan yang berhasil menghentikan dominasi partai yang telah berkuasa selama 50 tahun lebih di Jepang yaitu *Liberal Democratic Party* (LDP).

Masalah mulai muncul ketika Hatoyama tersandung kasus mengenai asal-usul dana kampanye yang tidak jelas sumbernya. Kasus ini juga melibatkan teman sejawatnya yaitu Ozawa Ichiro yang merupakan Sekretaris Jendral DPJ. Kemudian masalah lain yang juga menantang kredibilitas Hatoyama sebagai Perdana Menteri adalah mengenai permasalahan pangkalan militer Amerika di Okinawa yang banyak menuai protes dari masyarakat Jepang, yang semasa kampanyenya dijanjikan Hatoyama akan dipindahkan keluar Okinawa, ternyata tidak dapat diwujudkan oleh Hatoyama semasa kepemimpinannya.

Akhirnya karena janji kampanye tersebut tidak dapat diwujudkan maka Hatoyama mengundurkan diri sebagai perdana menteri Jepang, dimana masa kepemimpinannya hanya berlangsung selama delapan bulan. Peristiwa pengunduran diri ini hanya salah satu dari rentetan peristiwa pengunduran diri lainnya yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang maupun pejabat publik lainnya.

Cerita lainnya yaitu dari Seiji Maehara yang merupakan Menteri Luar Negeri Jepang dimasa pemerintahan Naoto Kan periode 2010. Maehara mengundurkan diri terkait pelanggaran yang dilakukannya terhadap undang-undang Jepang yang melarang masuknya dana politik dari warga asing. Maehara mengakui telah menerima dana sebesar 250.000 yen atau sekitar 3.000 dollar AS selama beberapa tahun terakhir dari seorang perempuan Korea berusia 72 tahun yang telah hampir sepanjang usianya menetap di Jepang.

Undang-undang yang berlaku di Jepang menutup kemudahan bagi warga asing untuk menjadi warga negara di negeri matahari terbit tersebut walaupun anggota keluarga dari warga asing itu telah menetap di Jepang selama beberapa generasi. Undang-undang pengaturan dana politik di Jepang melarang anggota parlemen untuk menerima donasi apa pun dari warga asing termasuk dari mereka yang terlahir di Jepang. Sebutan bagi penduduk yang berkebangsaan asing yang bermukim di Jepang ini disebut dengan *zainichi*. Berikut adalah pernyataan permohonan maaf oleh Maehara berikut pernyataan pengunduran dirinya sebagai Menteri Luar Negeri Jepang:

“Saya memohon maaf ke segenap rakyat bahwa saya terpaksa meletakkan jabatan setelah mengabdikan selama enam bulan karena telah menyebabkan ketidakpercayaan yang bermula dari isu politik dan uang meskipun saya telah berjanji untuk menciptakan kondisi politik yang bersih, saya sungguh menyesali masalah yang berasal dari kesalahan saya sendiri ini.”

Dari kedua cerita mengenai pengunduran diri yang dilakukan oleh pejabat publik Jepang, yang mewakili rentetan cerita pengunduran diri pejabat publik Jepang lainnya tersebut, sedikitnya telah memberikan gambaran mengenai perilaku politik Jepang di masa modern.

Dalam perjalanan sejarahnya Jepang dikenal sebagai Negara dengan kekuatan karakter budayanya yang dijadikan sebagai kebiasaan dan pedoman hidup dalam bermasyarakat.

Menurut Williams (1981, 1983), kata "culture" ("kebudayaan") pertama kali muncul sebagai kata benda, yaitu *cultivation* (pembudidayaan), yang berkaitan dengan proses pertumbuhan tanaman pangan. Selanjutnya, gagasan pembudidayaan itu mengalami perluasan sehingga mencakup hal yang berhubungan dengan jiwa manusia atau "roh", yang memunculkan ide tentang orang yang berbudi daya (*cultivated*) atau berbudaya (*cultured*). Pada abad ke 19 muncul definisi yang lebih antropologis yang memandang kebudayaan sebagai "keseluruhan cara hidup yang khas" dengan penekanan pada "pengalaman sehari-hari". (Chris Barker, 2005;48)

Dari faktor budaya kemudian berkembang menjadi budaya ekonomi, budaya politik yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku manusia baik dalam berinteraksi sosial maupun dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ataupun lembaga pemerintahan.

Meski pemerintahan diasosiasikan dengan Negara, menurut Barker konsep ini lebih baik dipahami dalam pengertian yang lebih luas sebagai regulasi yang ada dalam tatanan sosial, atau, untuk mengistilahkan dalam cara yang lebih disukai Foucault, sebagai *policing* masyarakat di mana sebuah populasi menjadi sasaran rezim birokratis dan mode-mode disiplin. (Barker, 2005;490)

Dengan melihat fenomena yang terjadi, yaitu fenomena pengunduran diri di lingkungan pejabat publik Jepang, khususnya pada tahun 2007 sampai 2011, yaitu suatu periode yang mengalami banyaknya peristiwa pengunduran diri yang dilakukan oleh pejabat publik Jepang, maka sangat menarik untuk melihat bagaimana fenomena pengunduran diri tersebut terjadi. Kata fenomena itu sendiri memiliki arti sebagai hal-hal yang dapat disaksikan oleh pancaindera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, dan fenomena juga diartikan sebagai suatu keajaiban atau sesuatu yang luar biasa, selain itu fenomena juga diartikan sebagai fakta seperti peristiwa sejarah yang tidak dapat diabaikan.

1.2. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk meneliti tentang fenomena pengunduran diri di lingkungan pejabat publik Jepang yang terjadi

pada periode 2007 sampai dengan 2011, peneliti akan menggunakan pendekatan Kajian Budaya atau *Cultural Studies*. Menurut Hall, *Cultural Studies* atau Kajian Budaya adalah sebuah formasi diskursif, yaitu "sekumpulan (atau formasi) gagasan, citra dan praktik yang menyediakan cara-cara untuk berbicara tentang, menyediakan bentuk-bentuk pengetahuan dan tingkah laku yang diasosiasikan dengan suatu topik, aktivitas sosial atau wilayah institusional tertentu dalam masyarakat." (S. Hall, 1997;6)

Sementara itu, Barker mendeskripsikan kajian budaya sebagai suatu bidang penyelidikan interdisipliner atau pascadisipliner yang mempelajari produksi dan penanaman peta makna. Suatu formasi diskursif, atau cara-cara berbicara yang teregulasi, yang menaruh perhatian pada isu-isu kekuasaan dalam praktik pemaknaan formasi-formasi kehidupan manusia. (Barker;2005;515)

Sejak awal perkembangannya, kajian budaya merupakan suatu wilayah kajian yang bersifat multidisipliner atau pascadisipliner. Sifat ini membuat kajian budaya tidak memiliki batas-batas disiplin yang jelas yang membedakannya dengan subjek-subjek disiplin lainnya. Oleh karena itulah, Bennet menawarkan suatu konsep yang disebutnya sebagai "elemen-elemen definisi" (*elements of definition*) dari kajian budaya yaitu:

- (1). Kajian budaya adalah bidang interdisipliner yang secara selektif mengambil berbagai perspektif dari disiplin lain untuk meneliti hubungan-hubungan antara kebudayaan dan politik;
- (2). Kajian budaya tertarik pada segala macam bentuk praktik, lembaga dan sistem klasifikasi yang memungkinkan ditanamkannya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kompetensi-kompetensi, rutinitas hidup dan bentuk-bentuk perilaku khas yang menjadi kebiasaan pada suatu populasi;
- (3). (3) Kajian budaya mengeksplorasi berbagai macam bentuk kekuasaan termasuk gender, ras, kelas, kolonialisme, dan lain-lain. Kajian budaya bermaksud mempelajari bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan ini saling berhubungan, serta mengembangkan cara-cara untuk memahami budaya dan kekuasaan yang bisa digunakan oleh mereka yang menjadi agen dalam upaya melakukan perubahan;

- (4). (4) Wilayah institusional utama kajian budaya adalah lembaga pendidikan tinggi, dan dalam hal ini kajian budaya punya kesamaan dengan bidang-bidang disiplin akademik lain. Meski demikian, kajian budaya berusaha menjalin koneksi-koneksi di luar wilayah akademik dengan gerakan-gerakan sosial politik, para pekerja di lembaga kebudayaan, serta manajemen kebudayaan. (Barker, 2005;8-9)

Storey (2009:2-5) membagi pengertian ideologi menjadi lima bagian, berikut adalah penjelasannya:

First, ideology can refer to a systematic body of ideas articulated by a particular group of people. For example, we could speak of "professional ideology" to refer to the ideas which inform the practices of particular professional groups. [...] here we would be referring to the collection of political, economic, and social ideas that inform the inspirations and activities of the Party.

A second definition suggest a certain masking, distortion, or concealment. Ideology as used here to indicate how some texts and practices present distorted images of reality. They produce what is sometimes called 'false consciousness'.

A third definition of ideology (closely related to, and in some ways dependent on the second definition) uses the term to refer to 'ideological forms'. This usage is intended to draw attention to the way in which texts (television, fictions, pop songs, novels, feature films, etc) always present a particular image of the world. This definition depends on a notion of society as conflictual rather than consensual, structured around inequality, exploitation and oppression.

A fourth definition of ideology is one associated with the early work of Roland Barthes argues that ideology (or 'myth' as Barthes himself calls it) operates mainly at the level of connotations, the secondary, often unconscious meanings that texts and practices carry, or can be made to carry.

A fifth definition is the definition developed by Louis Althusser. Althusser's main contention is to see ideology not simply as body of ideas, but as a material practice. [...].

Dalam analisis Gramscian, ideologi dipahami sebagai gagasan, makna, dan praktik-praktik yang, meski tampak seperti kebenaran-kebenaran universal, sebenarnya merupakan peta-peta makna yang menyokong kekuasaan kelompok-kelompok sosial tertentu. Yang terpenting ideologi bukanlah sesuatu yang terpisah dari aktivitas-aktivitas praktis kehidupan, melainkan fenomena material yang memiliki akar dalam kondisi sehari-hari. Ideologi menyediakan tata tingkah laku praktis dan perilaku-perilaku moral yang bisa disejajarkan dengan "agama" dalam pengertian sekuler, yakni suatu kesatuan yang diyakini antara konsepsi tertentu tentang dunia dengan norma perilaku yang sesuai. (Barker, 2005;79)

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif yang mengutamakan bahan yang sukar diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata ada dalam masyarakat (Soejono Soekanto,2002;45 Metode kualitatif merujuk pada cara-cara dan prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis berupaya menggambarkan suatu fenomena yang telah atau saat ini sedang terjadi. Sehingga dapat menghasilkan data-data yang mudah disimpulkan atau digeneralisasikan secara jelas dan lebih terperinci.

Data penelitian yang dikumpulkan dianalisa dengan teknik deskripsi analisis ini untuk menghasilkan analisa yang mendalam terhadap pemahaman mengenai fenomena pengunduran diri di lingkungan pejabat publik Jepang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan adalah metode yang memanfaatkan berbagai macam pustaka seperti buku, laporan periodik, jurnal, Koran, *website* dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik permasalahan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah "Budaya Mundur" Masyarakat Jepang

Sikap mundur yang biasa dilakukan oleh kalangan pejabat publik Jepang di era modern saat ini memiliki cerita panjang yang terhubung dengan

sejarah ratusan tahun berdirinya bangsa Jepang. Nilai-nilai konfusius sampai masuknya Budha telah menjadi landasan awal pembentukan etika dan moral bangsa Jepang yang kemudian mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa Jepang dari zaman monarki sampai zaman feodal. Nilai-nilai tersebut disinkretiskan atau dipadukan dan dijadikan falsafah bangsa untuk melanggengkan kepentingan penguasa pada waktu itu.

Nilai-nilai yang diambil dari berbagai ajaran seperti Konfusius dan Budha tersebut dapat terlihat dalam undang-undang pertama Jepang yang disebut dengan 17 Pasal atau disebut *Jyuu nana Kenpou* yang isinya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang dari apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti ; Bersahabatlah dengan sesama manusia, dan saling bekerja sama adalah hal yang utama Percayalah terhadap isi dari ajaran Buddha Janganlah memerintah (menyuruh) *Tenno* Para pekerja negara haruslah memiliki jiwa hormat dan rasa terima kasih. Kalau rasa hormat itu dipelihara maka alam akan seimbang. Apabila para pekerja negara menerima gugatan yang dikeluhkan dari masyarakat, maka janganlah menyelesaikannya dengan menerima suap dan sebagainya. (Sonoda Koyu,2006;360)

Apabila melihat dari isi tujuh belas Pasal tersebut terlihat banyak sekali hal-hal yang mengatur mengenai tanggung jawab, seperti tanggung jawab dalam pekerjaan, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. *Jyuu nana kenpou* yang awalnya dibuat pada zaman Yamato (zaman periode awal kemonarkian Jepang) untuk melanggengkan pemerintahan Jepang pada waktu itu, kemudian berlanjut dipertahankan sampai zaman feodal.

Di zaman feodal itulah kemudian isi pasal dikembangkan dan dibuat sesuai dengan kepemimpinan Jepang di zaman feodal. artinya karena zaman feodal ditandai dengan kelahiran dan kebangkitan militer Jepang atau dikenal dengan istilah *samurai*, maka nilai-nilai yang berlaku juga bersifat militer. Nilai-nilai yang bersifat militer itu disebut dengan *Bushido* atau kode etik *samurai*. nilai-nilai *bushido* inilah yang kemudian dijadikan landasan dan falsafah bangsa Jepang.

2.2. Sumber-sumber *Bushido*

Bushido yang merupakan pedoman etika dan pada awalnya hanya berlaku bagi kaum *Samurai*, kemudian pada zaman feodal nilai-nilai tersebut berlaku bagi semua kelompok masarakat dari

samurai, petani, sampai pedagang. *Bushido* sebagai kode etik tersebut memiliki sumber-sumber yang mendasarinya diantaranya,yaitu pengaruh Konfusius dan Budha.

a. *Shinto*

Shinto merupakan agama kepercayaan asli Jepang. *Shinto* berasal dari kata *Shin* atau *Kami*, yang berarti dewa dan *To* yang berarti jalan. *Shinto* dapat diartikan sebagai jalan para Dewa.

Ajaran *Shinto* mengajarkan kesetiaan kepada yang berkuasa, sehingga menetralisasi (kemungkinan) sifat sombong seorang pejuang militer. Kepercayaan *Shinto* menekankan kesetiaan dan kecintaan kepada negara dan *Tenno*. Ia tidak mengenal dosa (*sin*), tetapi lebih menekankan soal kehormatan dan harga diri (*honour*).

Menurut Nitobe dalam *Bushido The Soul of Japan*, *Shinto* memberikan doktrin terhadap *Bushido* mengenai kesetiaan pada yang berkuasa, hormat kepada leluhur, dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Ajaran *Shinto* mencakup dua segi yang paling utama dalam kehidupan emosional *Bushido*, Patriotisme dan loyalitas".(Inazo Nitobe,1969;14)

b. Konfusianisme

Bushido mencapai puncak kejayaanya pada saat masa Tokugawa dan pada masa Tokugawa pula Jepang lebih memperhatikan nilai-nilai konfusianisme yang merupakan salah satu ajaran dasar *Bushido*. Dalam pemerintahan Tokugawa, Jepang kembali memperhatikan ajaran-ajaran yang berasal dari Cina seperti ajaran konfusius. Ajaran inilah yang melahirkan *Bushido* ke dalam kehidupan bangsa Jepang. *Bushido* merupakan penyatuan prinsip-prinsip kesetiaan dan keberanian dengan sikap moral tertinggi yang diajarkan konfusius".

c. *Zen*

Zen bukan hanya salah satu sekte dalam Budha yang menarik pengikutnya diantara para prajurit, dan prajurit profesional tapi juga pada kelas-kelas masyarakat lainnya. Meskipun seperti itu *Zen* lebih dikenal dekat sebagai agama para *Samurai* pada era shogunat, "*Zen* pada masa awal shogunat awalnya sebagai skema untuk mengatur revolusi kultural untuk meningkatkan martabat dan legitimasi dari ksatria sebagai pemimpin secara duniawi. Oleh sebab itu, kemudian menjadi berkaitan dengan kelas militer, dan bahkan di sebut sebagai agama dari *Samurai*". (Clearly,1992; 12)

Dari ketiga sumber ajaran dan keyakinan yang dimiliki oleh kaum *Samurai* tersebut, para *Samurai* banyak mendapatkan inspirasi yang mendasari nilai-nilai *Bushido* sebagai kode etik yang harus dijalani dan dipatuhi oleh mereka. Sumber dari ajaran *Bushido* adalah pelajaran agama Budha, khususnya ajaran *Zen* dan *Shinto*, karena ajaran ini menimbulkan harmoni dengan apa yang dikatakan orang Jepang “kekuasaan absolute”. (Suryohadiprojo, 1987;48)

2.3. *Bushido* Sebagai Landasan “Budaya Malu” Bangsa Jepang

Bushido merupakan sebuah kode etik yang lahir pada jaman feodal Jepang yang dikhususkan dalam tatanan golongan kaum *Samurai*. Menurut de mente (2004:47), “*Bushido literally means something like military fighting way, but it is more commonly translated as the ways of the warrior*”. *Bushido* secara harfiah berarti seperti jalan pertempuran kemiliteran, tetapi biasanya lebih diartikan sebagai jalan ksatria.

“Bushido was the code of conduct of the Samurai, the aristocratic warrior class which arose during the wars of the 12th century between the Taira and Minamoto clans-and came to the glorious fruition in the Tokugawa period”.

Secara harafiah *Bushido* terdiri dari kata ***bushi*** (ksatria atau prajurit) dan ***do*** (jalan), yang dapat diartikan sebagai jalan *Samurai*. Kode etik *Bushido* bukanlah sebuah ajaran yang tertulis dan terucapkan, tetapi Nitobe mendefinisikannya sebagai berikut: (Nitobe,1969;4-5)

“Bushido, then is the code of moral principles which the knight were required or instructed to observe. It is not a written code; at the best it consists of a few maxims handed down from mouth to mouth or coming from the pen of some well-known warrior or savant. More frequently it is a code unuttered and unwritten, possessing all the more the powerful sanction of veritable deed, and of a law written on the fleshy tablets of heart. It was founded not on the creation of one brain, however able, or on the life of single personage, however renowned. It was an organic growth of decades and centuries of military career”.

Kode etik *Bushido* mengendalikan setiap aspek kehidupan para *Samurai*, seperti dalam hukum, berbudaya, berpakaian, pembentukan karakter dan berperilaku secara khusus sesuai dengan yang terdapat dalam *Bushido*.

“The bases of the moral foundation of Bushido were a highly developed sense of justice, courage in the cause of righteousness; benevolence combined with love, affection and sympathy for others; politeness combined with gracefulness; veracity at all times and in all things; a highly developed sense of honor; and absolute loyalty to the state and to one’s Lord.(De Mente, 2004;48)

Kode etik *Bushido* sendiri mulai dipegang teguh dan diterapkan pada masa pemerintahan *shogunat* Tokugawa yang menjalankan politik *sakoku* atau isolasi dari dunia luar yang berlangsung selama 250 tahun.”Kode etik *Bushido* dipegang teguh dalam masa *Tokugawa* dan disebarkan kepada seluruh masyarakat.”

Sejak saat itu pula *Bushido* menjadi nilai moral dan spiritual yang mengakar dan terus berkembang menjadi nilai moral bangsa Jepang.

Bagi bangsa Jepang, *Bushido* sendiri bukan saja sebagai ajaran leluhur masa lalu. Namun nilai-nilai *Bushido* telah menjelma menjadi bagian dari diri mereka, pada awalnya mengakar dalam jiwa *Samurai* dan terus berkembang menjadi kebajikan tertinggi dalam konsep moral bangsa Jepang. Pada zaman feodal berlangsung “*Bushido* telah terimplementasikan secara baik dan sudah menjadi sistem dan nilai-nilai kepribadian bagi setiap masyarakat Jepang”.

Berikut adalah Nilai-nilai *Bushido*;

Sebagai sistem moral dan kebajikan tertinggi kaum *Samurai*, *Bushido* sendiri memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai yang terkandung meliputi:(Ginjar Agustian,2010;40-49-85-105) ”***Gi***, intergritas; mempertahankan etika, ***Yu***, keberanian: berani dalam menghadapi kesulitan, ***Jin***, Kemurahan hati, mencintai sesama, kasih sayang, dan simpati, ***Rei***, Penghormatan santun, hormat pada orang lain, ***Makoto*** atau ***Shin***, kejujuran dan tulus ikhlas, ***Meiyo***, Nama baik: kemuliaan dan menjaga kehormatan, ***Chugo***, Kesetiaan: Loyal pada pemimpin dan guru, ***Tei***, Peduli pada yang lebih tua dan menghargai tradisi”.

1. *Gi*, Integritas: Mempertahankan Etika
Senantiasa mempertahankan etika, moralitas, dan kebenaran. Integritas merupakan nilai *Bushido* yang paling utama. Kata integritas mengandung arti keutuhan meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai ini sangat di junjung tinggi dalam falsafah *Bushido*, dan merupakan dasar untuk mengerti tentang moral dan etika serta menjalankan secara utuh dan menyeluruh.
2. *Yu*, Keberanian: Berani dalam Menghadapi Kesulitan
Keberanian merupakan sebuah karakter dan sikap untuk bertahan demi prinsip kebenaran yang dipercayai meski mendapat berbagai tekanan. Keberanian merupakan ciri para *Samurai*, mereka siap dengan resiko apapun termasuk mempertaruhkan nyawa demi memperjuangkan keyakinan.
3. *Jin*, Kemurahan Hati Mencintai Sesama, Kasih Sayang dan Simpati
Bushido memiliki aspek keseimbangan antara maskulin (yin) dan feminim (yang). Jin mewakili sikap feminim yaitu mencintai. Meski berlatih ilmu pedang dan strategi berperang, para *Samurai* harus memiliki sikap pengasih dan peduli kepada sesama manusia. Kasih sayang dan kepedulian tidak hanya ditujukan pada atasan dan pimpinan namun pada kemanusiaan. Sikap ini harus tetap ditunjukkan baik di siang hari yang terang benderang, maupun di kegelapan malam. Kemurahan hati juga ditunjukkan dalam hal memaafkan.
4. *Rei*, Penghormatan Santun, Hormat pada Orang Lain
Seorang *Samurai* tidak pernah bersikap kasar dan ceroboh, namun senantiasa menggunakan kode etiknya secara sempurna sepanjang waktu. Sikap santun dan hormat tidak saja ditujukan pada pimpinan dan orang tua, namun kepada tamu atau siapa pun yang ditemui. Sikap santun meliputi cara duduk, berbicara, bahkan dalam memperlakukan benda ataupun senjata.
5. *Makoto atau Shin*, Kejujuran dan Tulus Ikhlas
Jujur dan ikhlas merupakan kode etik *Samurai* yang berarti berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Para *Samurai* harus menjaga ucapannya dan selalu waspada tidak menggunjing, bahkan saat melihat atau mendengar hal-hal yang buruk tentang siapapun.

“Kejujuran adalah kekuatan yang menentukan dari sikap yang sesuai dengan alasan tanpa keraguan, untuk mati ketika dianggap pantas untuk mati, untuk berhenti ketika berhenti itu adalah sebuah kebenaran.”

6. *Meiyo*, Nama Baik: Kemuliaan dan Menjaga Kehormatan
Bagi *Samurai* cara menjaga kehormatan adalah dengan menjalankan kode *Bushido* secara konsisten sepanjang waktu dan tidak menggunakan jalan pintas yang melanggar moralitas. Seorang *Samurai* memiliki harga diri yang tinggi, yang mereka jaga dengan cara perilaku terhormat.
7. *Chugo*, Kesetiaan: Loyal pada Pemimpin dan Guru
Kesetiaan ditunjukkan dengan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Kesetiaan seorang ksatria tidak saja saat pimpinannya dalam keadaan sukses dan berkembang. Bahkan dalam keadaan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, pimpinan mengalami beban masalah, seorang ksatria tetap setia pada pimpinannya dan tidak meninggalkannya. Puncak kehormatan seorang *Samurai* adalah mati dalam menjalankan tugas dan perjuangan.
8. *Tei*, Peduli pada Yang Lebih Tua dan Menghargai Tradisi.
Ksatria sangat menghormati dan peduli pada orang yang lebih tua baik orang tua sendiri, pimpinan, maupun para leluhurnya. Mereka harus memahami silsilah keluarga juga asal-usulnya.

2.4. *Meiyo* Sebagai Bentuk Kewajiban Menjaga “Nama Baik” Seseorang

Meiyo adalah salah satu nilai yang terkandung dalam *Bushido* mengenai nama baik, kemuliaan, dan menjaga kehormatan. Seorang *Samurai* akan selalu menjaga harga diri dan kehormatannya dengan cara dan perilaku yang terhormat juga. Karena bagi seorang *Samurai* hal itu merupakan salah satu hal yang paling pokok dalam moralitas dan perilaku kehidupannya.

Seperti yang diungkapkan oleh De Mente (2009:129): Salah satu karakter unik dari kelas *Samurai* adalah tingginya harga diri mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat peka pada perilaku terhormat.

“The Code of honor was inclined to run was strongly counterbalanced by

preaching magnanimity and patience"
(Nitobe, 1969:76)

Lebih lanjut juga Nitobe mengatakan: Kehormatan bagi seorang *Samurai* diyakini timbul sejak seseorang berada dalam kandungan ibunya. Hilangnya suatu kehormatan tercermin dari rasa malu yang merupakan hukuman paling buruk. Namun, meskipun *Samurai* memiliki keistimewaan, tidak boleh mengatasnamakan kehormatan dan menyerang orang hanya karena masalah yang kecil, tetapi dalam prakteknya pada masa feodal ketika seorang samurai ataupun tuannya dilecehkan harga dirinya, maka sebuah aksi pembalasan yang sampai menyebabkan kematian sekali pun tidak dianggap sebagai sebuah agresi yang negatif, karena hal itu dianggap sebagai sebuah tindakan mulia karena telah berjuang mempertahankan kehormatannya.

Bushido Meiyō sebagai salah satu kode etik tertinggi dalam perilaku & moral para *samurai* sudah mulai diajarkan dan diterapkan oleh para *Samurai* sejak dini. Dari para *Samurai* muda sampai para *Samurai* yang sudah sangat berpengalaman sekalipun dan terus dijaga dan diterapkan dengan baik. Seperti yang di ungkapkan oleh Nitobe(1969;80):

"To shun shame or win a name, Samurai boys would submit to any privations and undergo severest ordeals of bodily or mental suffering".

Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Benedict (1982; 307-308):

"Mereka yang menghargai dirinya sendiri memetakan jalan hidupnya, bukan antara "baik" dan "jahat", tetapi antara "orang yang tindakannya sesuai dengan yang diharapkan" dan orang yang tindakannya tidak sesuai dengan yang diharapkan", dan mereka ini adalah orang-orang yang 'tahu malu (*haji*)' dan kehati-hatiannya sangat besar".

2.5. "Meiyō" (Nama Baik) Melahirkan "Haji no Bunka" (Budaya Malu)

Dalam menjaga dan menjalankan nilai *Bushido Meiyō*; nama baik, kemuliaan, dan menjaga kehormatan melahirkan sebuah prinsip moral yang terkandung dalam pengimplementasian *Bushido Meiyō* tersebut, yaitu budaya malu atau *Haji no Bunka* yang menjadi budaya leluhur bangsa Jepang.

Seperti yang diungkapkan oleh Miki Saburo Mori dalam bukunya *Na to haji no Bunka*: (Miki Saburo,1981;132)

“名は表であり恥はその裏である”。

Na wa omote de ari haji wa sono ura de aru.

“Kemasyuran terdapat pada bagian depan, dan malu ada di balik itu”.

Maksud dari pernyataan di atas tersebut adalah, bahwa dalam sebuah nama, terdapat malu yang terus terdapat, mengintai dan dijaga dalam tata cara kehidupan. Karena dibalik setiap orang, terdapat malu yang senantiasa akan timbul secara otomatis bila tata cara dan perilaku kita dalam kehidupan terdapat kesalahan. Apabila dalam kebudayaan barat menekankan pada "dosa" pada perilaku tiap personalnya, maka dalam kebudayaan Jepang, adalah kebudayaan yang menekankan "malu":(Miki Saburo, 1981;132)

"Budaya dosa sesungguhnya adalah kesadaran akan kesalahan secara batinih berdasarkan kebajikan, sedangkan budaya malu sesungguhnya adalah paksaan secara lahiriah berdasarkan kebajikan. Malu adalah sebuah respon terhadap kritikan dari orang lain."

Malu merupakan sebuah kebajikan akan kesadaran diri sendiri yang berdasarkan dari kritikan orang lain terhadap tingkah laku yang melahirkan secara lahiriah yang telah tertanam dalam diri dan jiwa rakyat Jepang.

"Malu (dalam bahasa Jepang disebut "*Haji*"), adalah reaksi atas kritik atau pandangan orang lain, dalam masyarakat Jepang menjadi suatu pertimbangan penting dalam menata pola kelakuan. Rasa malu (*Haji*) adalah suatu hal yang dirasakan sangat pahit di Jepang. (Benedict,1982;104-106)

"Keajaiban malu di dalam etika bangsa Jepang mempunyai otoritas yang sama dengan makna 'nurani yang bersih', yang dalam konteks bangsa Barat diartikan sebagai hubungan yang baik dengan Tuhan' dan 'Penghindaran dari dosa' dalam etika Barat".(Benedict, 1982;234)

"*Haji*" adalah suatu bentuk sanksi masyarakat bagi orang Jepang. Sanksi yang berat karena akan mengakibatkan rusaknya hubungan atau keregangan dengan lingkungannya Maka harus

berhati-hati dalam berkelakuan, memelihara nama baik “*Meiyo*” dan menjaga muka agar tetap tegak.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *Haji no Bunka* adalah sebuah landasan moral dan budaya leluhur yang termasuk dalam nilai *Bushido Meiyo*, sehingga rasa malu adalah sebuah hal yang paling hakiki yang juga harus terus dijaga untuk mengimplementasikan *Bushido Meiyo* itu sendiri karena secara otomatis akan melahirkan *Haji* itu juga. Malu atau *Haji* itu sendiri dalam kehidupan para *Samurai* biasanya hadir dari sebuah kegagalan dalam menjalankan tugas atupun kalah dari sebuah pertempuran yang diimplementasikan dengan cara bunuh diri sebagai bentuk implementasi *Bushido Meiyo*, “jika mereka tidak berhasil menunaikan tugas, atau demi menanggung rasa malu karena kekalahan, mereka rela melakukan bunuh diri atau lebih dikenal dengan *seppuku* (ritual bunuh diri dimasa samurai berkuasa).

Seppuku sebagai implemmentasi *Haji no Bunka* dari para *Samurai* adalah sebuah ritual yang sakral yang dilakukan oleh para prajurit-prajurit di era feudal untuk menebus kesalahan, kegagalan, dan juga rasa malu dari kesalahan yang telah dilakukannya.

Bagi sebagian orang mungkin menganggap *seppuku* adalah sebuah hal yang sangat aneh dan sadis, bahkan mungkin adapula anggapan bahwa hal tersebut sangatlah tidak masuk akal dan tidak berperikemanusiaan. Namun khususnya bagi para *Samurai* justru tindakan tersebut adalah sebuah ritual yang menjadi kewajiban dalam suatu pertahanan yang mendapat makna penghormatan dan juga merupakan suatu keharusan hukuman yang dijalankan oleh kaum *Samurai* atas kesalahan, kegagalan, dan untuk menjaga suatu nama baik dan kehormatan baik namanya sendiri maupun kelompoknya.

2.6. Grupisme Dalam Masyarakat Jepang

Melihat begitu pentingnya upaya mempertahankan nama baik dan kehormatan diri dan kelompoknya maka dapat dikatakan bahwa bangsa Jepang, merupakan salah satu bangsa yang mempercayai kepentingan kelompok berada di atas kepentingan individu. hal ini dapat terlihat dari bagaimana masing-masing individu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga nama baik kelompok seperti yang tertuang dalam berbagai cerita-cerita kepahlawanan bangsa Jepang terdahulu.

Seperti diungkapkan oleh De mente (2004:178):

*“Group consciousness is characterized by *aun no kokyo*, which can be translated as “the ability to think unison. It is the common cultural knowledge that makes it possible for members of a group to know what to do and how to do it without being told.”*

“Kesadaran kelompok adalah karakter dari *aun no kokyo*, yang dapat diartikan sebagai “kemampuan untuk berpikir secara serempak atau berkelompok. Itu adalah sebuah budaya pengetahuan untuk kebersamaan yang membuat kemungkinan para anggota dalam kelompok untuk tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya tanpa diberitahu”.

Kepercayaan mengenai hal tersebut sudah dimulai sejak zaman feudal dahulu dan merupakan salah satu pembentukan yang terbentuk dari nenek moyang bangsa Jepang sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Rice (2004:4);

“The homogeneity of the Japanese race over 2.000 years or more has created a society in which the different between its members and those who are mere visitors has become – not just in looks and etiquette but in ways of thinking and acting well.”

Lebih lanjut Rice (2004:143) mengatakan:

*“In trying to analyse the essence of Japan, we always come back to the idea of the group and the relationship between people. Japan society is a long search for *wa*, a desire to find harmony in everything and in every action. Bowing to the needs of the group before satisfying one’s”*

Dari politik isolasi yang berjalan kurang lebih dari 250 tahun itulah dapat diperkirakan sebagai bentuk awal karakteristik bangsa Jepang yang homogen dan lebih mementingkan kelompok dibanding tiap-tiap individunya. Dan dari homogenisme mereka itulah timbul sikap paling utama terhadap kelompok dibandingkan individu. Nakane Chie seorang antropolog Jepang mengatakan bahwa: (Suryohadiprojo, 1987:43)

“Membedakan antara kerangka dengan atribut dalam posisi individu masyarakat. Yang dimaksud dengan “kerangka” disini adalah lingkungan dimana individu itu

berada atau dalam kelompoknya, sedangkan atribut adalah tempat individu berada. Di Jepang, kerangka lebih penting daripada atribut”.

Artinya secara umum boleh dikatakan bahwa sekali pun individu dihargai sebagai suatu nilai penting, tetapi nilai kelompok lebih tinggi daripada individu. Karakteristik kelompok atau homogenisme bangsa Jepang sendiri telah menjadi dasar karakter bangsa Jepang pada umumnya, dan tidak pernah membedakan antara pemimpin atau pun anggota. Semua anggota dalam sebuah kelompok tidak terkecuali seorang pemimpin, memiliki rasa bahwa kelompok adalah hal yang lebih utama dari pada individunya.

Peranan kelompok dan individu yang kuat karena didasarkan oleh kepentingan kelompok dibandingkan individunya, merupakan salah satu karakteristik bangsa Jepang itu sendiri. Dari hal yang lebih mementingkan kelompok dibandingkan tiap-tiap individunya pula, dalam terbentuk sikap menjaga nama baik dan kehormatan kelompoknya.

BAB III. FENOMENA PENGUNDURAN DIRI DI LINGKUNGAN PEJABAT PUBLIK JEPANG

Shinzo Abe adalah seorang Perdana Menteri Jepang ke 90 dan juga seorang pemimpin Partai Demokratik Liberal atau LDP, yang menggantikan Perdana Menteri sebelumnya yaitu Junichiro Koizumi yang juga berasal dari Partai yang sama dimana Abe berpolitik. Koizumi berhenti dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena habisnya masa jabatannya. Pada saat itu, Abe juga dikenal sebagai seorang Perdana Menteri termuda yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Jepang semenjak perang dunia kedua. Pengunduran dirinya adalah bukan yang pertama dan juga yang terakhir yang mewarnai berbagai pengunduran diri dari pejabat-pejabat publik lainnya di Jepang.

Sebelum pengumuman keputusan pengunduran diri tersebut, Kabinet dan Pemerintahan di bawah kekuasaan Shinzo Abe memang tak lepas dari hal-hal lain yang memperburuk citra dan pandangan dari rakyat Jepang secara keseluruhan. Kasus-kasus besar yang terjadi dalam pemerintahannya membuatnya semakin terpojok sebagai seorang Perdana Menteri.

Hampir setahun pemerintahan yang dipimpinnya dinodai dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan beberapa menteri dalam kabinetnya terjadi. Tiga menteri mengundurkan diri setelah diketahui telah melakukan korupsi dan skandal keuangan; Menteri Reformasi Administratif, Genichiro Sata, Menteri Pertahanan, Fumio Kyuma, dan Menteri Pertanian, Toshikatsu Matsuoka. Bahkan tragisnya, Menteri Pertanian Toshikatsu Matsuoka harus rela mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri setelah diketahui dirinya melakukan korupsi. Matsuoka bunuh diri saat akan diminta parlemen untuk menjawab pertanyaan mengenai skandal suap dana politik dan kontrak bisnis yang melibatkan Matsuoka.

Matsuoka melakukan bunuh diri, dan ditemukan gantung diri dalam rumahnya. Dan dalam hal itu Abe dituding sebagai pihak yang mendatangkan beban yang harus diemban Matsuoka. Sikapnya yang terus mempertahankan Menteri Matsuoka menjadi salah satu penyebab bunuh diri Matsuoka dan merosotnya popularitas pemerintahan Shinzo Abe, karena dianggap merusak citra pemerintah. Keributan mengenai data pensiun pun menjadi salah satu hal yang mencoreng kinerja pemerintahan Shinzo Abe. Data pensiun di Jepang adalah hal yang sangat sensitif dan krusial dalam hal pengelolaannya dan selalu dicermati apabila tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu negara dengan jumlah lansia terbanyak, data pensiun merupakan hal yang sangat diperhatikan di Jepang, dan pada saat itu disinyalir pemerintahan Abe tidak dapat mengelolanya dengan baik. Hal itu terungkap setelah Badan Asuransi Sosial (SIA) mengakui pihaknya tidak dapat mengidentifikasi 50 juta pembayaran pensiun premium yang tercatat dalam kurun 30 tahun.



Gambar 1. Yasuo Fukuda yang mulai kehilangan kepopulerannya semenjak memberlakukan kebijakan jaminan kesehatan masyarakat

Noda hitam Pemerintahan Abe tidak hanya berhenti dalam kasus-kasus di atas. Beberapa waktu kemudian, Menteri Pertanian Norihiko Akagi, yang ditugaskan oleh Abe sebagai pengganti Menteri Pertanian sebelumnya, Toshikatsu Matsuoka; yang terlibat skandal korupsi dan harus berakhir tragis dengan bunuh diri di rumahnya, pun mengumumkan pengunduran dirinya setelah Partainya kalah telak oleh DPJ dalam pemilu Majelis Tinggi lalu. Akagi menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab dalam kekalahan telak Partainya dalam Pemilu.

Dan dalam hal itu Abe dituding sebagai pihak yang mendatangkan beban yang harus diemban Matsuoka. Sikapnya yang terus mempertahankan Menteri Matsuoka menjadi salah satu penyebab bunuh diri Matsuoka dan merosotnya popularitas pemerintahan Shinzo Abe, karena dianggap merusak citra pemerintah.

Skandal-skandal korupsi yang dilakukan oleh empat orang anggota kabinetnya, juga data pensiun yang tak terkelola dengan baik, yang dianggap sebagai penyebab paling krusial dalam lahirnya mosi tidak percaya dari rakyatnya. Kebijakannya untuk melawan terorisme dengan memperpanjang izin pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang pun menuai banyak protes. Dengan banyak tercorengnya kinerja pemerintahan dalam masa kekuasaannya, Abe pun akhirnya mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri Jepang.

Shinzo Abe dan menteri-menterinya yang mengundurkan diri dalam waktu yang singkat sebelum masa jabatannya berakhir juga mewarnai pengunduran diri dari pejabat-pejabat publik lainnya. Pengunduran ini juga terjadi pada pengganti dari Shinzo Abe, yaitu Yasuo Fukuda yang mulai kehilangan kepopulerannya semenjak memberlakukan kebijakan tentang skema jaminan kesehatan masyarakat yang bakal menaikkan biaya bagi banyak orang tua. Setelah isu kebijakan tersebut maka kepopuleran Fukuda turun hingga 29%.

Berikut adalah pernyataan Fukuda dalam pengunduran dirinya :

“To be honest, from the beginning, longstanding problems appeared one after the other and I had to face them, dealing with them worked me to death. This is the perfect timing to not cause people too much trouble.”

Setelah pengunduran dirinya, Fukuda digantikan oleh Taro Aso yang tidak lama juga melakukan pengunduran diri karena permasalahan ekonomi yang tak kunjung membaik di Jepang. Hal ini sangat menjadi pukulan telak dalam kepemimpinan Taro Aso, dikarenakan janji perbaikan ekonomi dengan merangkul kelompok petani dan keluarga-keluarga di Jepang tidak dapat terwujud sesuai dengan janji kampanyenya tak ayal pengunduran diripun dilakukan oleh Perdana menteri Taro Aso.

"I find it quite unfortunate that I've lost quite a few colleagues, and as party head, I feel this responsibility quite heavily. As a result, I express my desire to resign as LDP party head. For the LDP, I feel that we should have a new party leader election and aim for a new start."

Mundurannya Aso, digantikan oleh Yukio Hatoyama dari partai *Japan Democratic Party* (JDP) yang juga berujung sama yaitu “pengunduran diri”, kali ini pengunduran Hatoyama juga merupakan kegagalan Hatoyama dalam mewujudkan janji kampanyenya yang akan memindahkan pangkalan udara mariner Amerika Futenma dari Okinawa. Dalam hal ini Hatoyama mendapatkan dua tekanan sekaligus, yaitu dari penduduk Okinawa yang memang sudah lama menginginkan dipindahkannya pangkalan militer AS dan juga tekanan dari AS yang menjadi berita yang tidak menyenangkan untuk pihak AS.

"Since last year's elections, I tried to change politics so that the people of Japan would be the main characters, That was mainly because of my failings, The public has refused to hear me. There was no choice but to keep the base on Okinawa, I sincerely hope people will understand the agonizing choice I had to make. I knew we had to maintain a trusting relationship with the US at any cost."

Selanjutnya giliran Naoto Kan yang menggantikan Hatoyama melakukan aksi mundur bersama dengan para kabinetnya. Kemunduran Naoto Kan disebabkan dengan kegagalan dalam masa kepemimpinannya dalam hal menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan setelah terjadinya bencana alam tsunami yang merembet kepada permasalahan nuklir di Fukushima yang tak kunjung selesai tetapi justru banyak menimbulkan kekhawatiran di tengah tengah masyarakat.

Kan berkuasa selama 15 bulan. Ia adalah yang terlama menjabat sebagai Perdana Menteri setelah berbagai peristiwa pengunduran diri yang secara berturut-turut dilakukan oleh pejabat publik Jepang dari tahun 2006. Pengganti Kan akan menjadi Perdana Menteri keenam dalam lima tahun terakhir yaitu Yoshihiko Noda.

Dari beberapa cerita pengunduran diri yang marak dilakukan oleh para pejabat publik di Jepang, telah memberikan sebuah gambaran yang nyata tentang bagaimana pola perilaku dari budaya berpolitik negeri sakura tersebut. Kalau pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang konsep *bushido* yang diopengaruhi oleh nilai-nilai Konfusius dan Budha yang dijadikan falsafah pada zaman feodal, maka yang terjadi di masa modern ini menjadi sangat menarik untuk melihat bahwa perilaku *bushido* tersebut yang apabila dilihat dari analisa gramscian disebut sebagai *hegemony*, telah menjadi *hegemony* nilai yang dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat Jepang sehingga menjadi “ sanksi sosial” yang ampuh dalam memobilisasi masyarakat Jepang.

“*Harakiri* Politik” yang menjadi tradisi para ksatria di Jepang merupakan cerita panjang yang terbiasa mewarnai cerita-cerita dalam budaya masyarakat Jepang yang masuk keseluruhan aspek kehidupan di Jepang sampai ke bidang politik dan pemerintahan. Prosesi perobekan perut dan pemenggalan kepala yang biasa dilakukan oleh sekelompok *samurai* (prajurit) di Jepang pada era Feodal merupakan ritual Pembersihan kesalahan dan kegagalan yang dianggap sebuah prosesi yang suci dan sakral.

Prosesi hara-kiri tersebut pun merupakan sebuah tindakan yang dianggap sebagai bentuk pertanggung jawaban dari setiap individu dalam menjalani kehidupannya di dunia. Sehingga bagi siapapun yang melakukan “*harakiri*”, telah dianggap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ternoda dengan cara pembersihan yang “terhormat”.

Apabila dilihat dari konteks sejarah budaya Jepang, dimana nilai-nilai dari Konfusius dan Budha dijadikan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, maka dapat dilihat bahwa kepentingan elit penguasa yaitu pada zaman feodal khususnya dalam memberlakukan “*Bushido*” sebagai acuan dalam bertindak setiap masyarakatnya tidak terlepas dari kepentingan kelompok kuasa untuk melanggengkan “kekuasaan” yang dipegang oleh kelompok *samurai* itu sendiri. Seperti dibaginya

kelas masyarakat kedalam 4 lapisan sosial (*Shinokosho*) yaitu kelas sosial yang menempatkan kelas samurai berada di tempat teratas dari kelas sosial lainnya seperti petani, pengrajin dan pedagang. Legitimasi kelas sosial yang disahkan semakin memperkuat langgengnya sistem hierarki dalam masyarakat Jepang.

Untuk mempertahankan keutuhan dan kelangsungan kelompok samurai pada waktu itu maka dibuatlah nilai-nilai yang berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat seperti *bushido*. *Bushido* tidak hanya mengajarkan tentang kewajiban yang harus dilakukan dalam membayar kesalahan saja, tetapi juga mengajarkan kewajiban dalam mengindahkan balas budi, rasa malu, tanggung jawab, kesadaran berkelompok, kesetiaan, menjaga nama baik, harmony, dan masih banyak lagi.

Itu sebabnya bagi masyarakat Jepang pada masa feodal *bushido* dianggap sebagai “kode etik” yang mencerminkan integritas dari individu yang bersangkutan. Dalam kode etik ini masyarakat Jepang mempercayai bahwa dalam menjalankan hidup diperlukan kesadaran dalam menciptakan keseimbangan, yaitu baik keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara pengorbanan dan kesetiaan, dan keseimbangan dalam menjalankan nilai-nilai kehidupan di alam semesta.

Bila dilihat dari kelahiran ide mengenai “*bushido*” yang lahir pada tahun 1600, maka proses pengawetan nilai ini dapat dilihat pada era modern awal, yaitu Meiji dalam peristiwa restorasi Meiji (1867) yang menginspirasi sekelompok masyarakat dalam mengusir pengaruh asing secara besar-besaran yang dikenal dengan semboyan “*sonno joi*” (usir orang barbar, muliakan kaisar). Pada peristiwa ini banyak sekali peristiwa pemberontakan-pemberontakan dengan menggunakan cara-cara yang dipakai semasa 260 tahun era kejayaan samurai.



Gambar 2. PM Jepang Naoto Kan mundur setelah berkuasa 15 bulan

Perombakan tidak hanya terjadi pada isi dari Undang-Undang Dasar Jepang saja, tetapi juga pada beberapa nilai-nilai tradisional yang dianggap sangat berpotensi dan bertanggung jawab terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militer Jepang seperti doktrin "*tenno haika banzai*" (semoga kaisar hidup selama ribuan tahun) yang menggiring seluruh masyarakat Jepang dalam peperangan.

Melalui demokrasi khas Jepang inilah beberapa nilai dipadu dan padankan menjadi khas Jepang yang diantaranya adalah sebagai berikut ini ; (Kenneth G Henshall,2004;191)

1. Determination to succeed
2. Continuing national pride and nationalistic spirit
3. Willingness to learn from stronger powers
4. Resilience
5. Single mindedness of purpose
6. Obidience to authority (albeit often under duress)
7. Awareness of importance of economy
8. Awareness of importance of education to shape worldview
9. Pragmatic ability to mix old and new
10. Importance legitimisation of power by high authority
11. Partial revival of sense of Japanese racial supremacy
12. Lack of Enthusiasm for Socialism
13. Partial revival of fatalism and resignation
14. Disorientation and anxiety when goals or framework not clearly defined

Melalui beberapa nilai-nilai di atas, dapat terlihat bahwa nilai kepatuhan kepada otoritas kuasa walaupun kadang berada di bawah paksaan merupakan salah satu nilai yang tidak hilang semenjak tahun 1600 ketika penguasa Tokugawa menancapkan kekuasaannya di era feodal Jepang.

Wajah Jepang di era modern ini khususnya perilaku budaya politiknya telah terbangun dari nilai-nilai yang lahir semenjak ratusan tahun yang lalu. Kesadaran kelompok yang tinggi, kewajiban masing-masing individu dalam mengemban dan menjaga nama baik dirinya maupun kelompoknya bukanlah hal yang baru dalam hitungan tahun di Jepang. Nilai-nilai tersebut "diawetkan", dan terus dipertahankan melalui institusi-institusi yang berperan seperti pendidikan, aktor pemerintahan dan lainnya. sehingga nilai-nilai tersebut menjadi sebuah ideologi sebagai hasilnya "sanksi sosial" akan menjadi pengawasnya.

Hal ini dapat terlihat dalam euphoria kebahagiaan masyarakat Jepang dalam menyambut mekarnya bunga sakura. Masyarakat Jepang berbondong-bondong merayakan, menikmati keindahan bunga sakura yang hanya mekar sekali dalam setahun dalam periode yang singkat, yaitu dari akhir bulan Maret sampai dengan awal April. Bunga sakura bagi masyarakat Jepang bukan hanya sekedar bunga biasa, tetapi lebih dari itu mekarnya bunga sakura memiliki makna yang sakral yang secara mitologi dipercaya masyarakat Jepang sebagai simbol suci dari "*Bushido*".

Hal ini juga dapat diamati melalui pemaparan Michael Blaker (1977;4-8) mengenai gaya berpolitik dan diplomasi bangsa Jepang di era modern saat ini, dalam penjelasannya Blaker membagi gaya berpolitik bangsa Jepang ke dalam 4 bagian diantaranya yaitu;

1. *jiyuu kodo (freedom of action)*
2. *Happo bijinshugi (looking pretty for everyone)*
3. *Enryo gaiko (restrained diplomacy)*
4. *Kiken Kaihi (risk avoidance)*.

Dalam konteks budaya politik Jepang saat ini, nilai-nilai "malu" yang dijadikan representasi dari bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan integritas dari seorang pemimpin telah menjadi "pengawas" bagi jalannya kinerja para pejabat publik di Jepang. Dengan sendirinya akhirnya nilai-nilai seperti kesetiaan, budaya malu, kewajiban menjaga nama baik, telah menjadi sebuah ideologi bagi masyarakat Jepang yang secara sadar "mau tidak mau" harus menjadi bagian yang menjalankan, mempercayai dan melanggengkan nilai-nilai tersebut.

Untuk itu akan menjadi lebih mudah memahami fenomena pengunduran diri para pejabat publik Jepang yang terjadi secara bertubi-tubi dari tahun 2006 sampai dengan 2011, alasan-alasan pengunduran diri karena kegagalan dalam mewujudkan janji kampanye, terlibat skandal korupsi, ketahuan menerima dana kampanye, kecelakaan kereta shinkansen, upaya perbaikan ekonomi yang tak kunjung membaik, salah ucap di depan media yang menyinggung masyarakat, adalah beberapa alasan-alasan yang disinyalir menjadi penyebab mundurnya para pejabat publik di Jepang.

Mereka para pejabat publik tersebut seakan tidak punya pilihan lain selain "*harakiri politik*" untuk

membersihkan namanya juga nama kelompoknya yaitu partai yang menaunginya. Pengunduran diripun menjadi satu-satunya jalan untuk menunjukkan pertanggungjawabannya dalam mengemban amanah sebagai pejabat publik. Hal ini tentunya terlepas dari "kesadaran sejati" atau "ketulusan" dalam melakukannya. Sekali lagi ketika itu sudah berwujud dalam bentuk "sanksi sosial" maka, siapapun tidak ada pilihan lain dalam melakukannya.

IV. KESIMPULAN

Fenomena pengunduran diri yang banyak dilakukan oleh kalangan pejabat publik Jepang, telah memberikan gambaran mengenai budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang. "budaya mundur" yang merupakan cerminan dari "budaya malu" telah menjadi ritual yang dimiliki dalam sejarah panjang bangsa Jepang.

"Harakiri politik" yang dilakukan di kalangan pejabat publik Jepang telah menunjukkan bagaimana budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Rasa pertanggungjawaban yang besar terhadap kelompok merupakan harga mutlak yang harus dibayar oleh masing-masing individu yang berada dan menjadi bagian di dalamnya.

Kewajiban mengindahkan tanggung jawab, kesetiaan, mendahulukan kepentingan kelompok, menjaga nama baik adalah bagian dari kewajiban setiap atribut terhadap kerangkanya. Konsep ini dipercaya oleh bangsa Jepang berdasarkan filosofi tua mengenai "bushido" yang dianalogikan dengan bunga sakura. Menjadi indah untuk selalu dikenang adalah hal yang mulia, untuk itu setiap cela dan noda harus dibersihkan.

Konsep "bushido" yang merupakan falsafah warisan zaman feodal ini kemudian mengalami "pengawetan selektif", yaitu istilah dalam kultural studies yang menyatakan bahwa nilai-nilai budaya yang menjadi ideologi adalah hasil dari adanya proses yang dilanggengkan oleh otoritas kuasa sehingga walaupun dengan berjalannya ruang dan waktu beberapa nilai-nilai tersebut masih terlihat walaupun dalam bentuk yang sudah jauh berbeda. Proses "pengawetan selektif" inilah yang kemudian tanpa disadari menjadi *hegemony* nilai bagi masyarakat Jepang, sehingga bagi siapapun yang mencoba melanggarnya akan berhadapan dengan "sanksi sosial" yang sangat berat. Ketika nilai ini sudah terekam dalam jejak panjang masyarakat

Jepang kemudian dianggap sebagai nilai-nilai leluhur yang terus "diawetkan", maka hukum yang berjalan adalah "sanksi sosial", karena ketika penghakiman masyarakat menjadi ampuh, maka penilaian umum (*looking pretty for everyone*) akan menjadi pertimbangan yang mutlak dan seakan tidak memberikan tempat pada pilihan yang lain, disitulah terjadi fenomena pengunduran diri yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pejabat publik Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Barker, Chris. 2005, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, PT. Bentang Pustaka, Yogyakarta.
- [2] Benndict, Ruth. 1982, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni*.
- [3] Blaker, Michael. 1977, *Japanese Negotiating Style; "Who Wins; Bargaining Power and Success"*, Columbia University Press, New York.
- [4] Clearly, Thomas. 1992. *The Japanese Art Of War*. Boston & London: Shambala.
- [5] De Mente, Boye. 2004, *Japanese Cultural code Words*, Rutland, Vermont & Tokyo: Tuttle Publishing.
- [6] Ginanjar, A. Agustian. 2010, *Spiritual Samurai*. Jakarta: Arga Tilana.
- [7] Hall, S. (ed.), *Representation*. (London & Thousand Oaks, California: Sage, 1997. John Storey, 2009, *Cultural Theory And Popular Culture (Fifth Edition)*. (London: PEARSON Longman.
- [8] Henshall, Kenneth G. 2004, *A History of Japan; From Stone Age to Superpower, 2nd Edition*, Palgrave Macmillan, New York.
- [9] Koyu, Sonoda. 2006, *The Cambridge History of Japan Volume I : Early Buddha Worship*, Cambridge University Press.
- [10] Nitobe, Inazo. 1969, *Bushido the Soul of Japan*.
- [11] Mori , Miki Saburo. 1981, *Na to haji no Bunka*.
- [12] Rice, Jonathan. 2004, *Behind The Japanese Mask*.
- [13] Sayyidiman, Suryohadiprojo. 1987, *Belajar dari Jepang: Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- [14] Soekanto, Soejono. 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Surajaya, I Ketut. 2001, *Pengantar Sejarah II*, UI, Depok.

Situs Internet

- [1] Istilah didapat dari artikel Handoyo El Jefry, *Harakiri Politik: Tradisi Pemimpin Ksatria*, (<http://politik.kompasiana.com/2012/07/24/harakiri-politik-tradisi-pemimpin-ksatria/>) diakses tgl 23 Oktober 2012.
- [2] http://www.dpj.or.jp/english/about_us/sec_gen.html, diakses 14 Pebruari 2012.
- [3] <http://www.bbc.co.uk/news/10211314>, diakses pada 16 Pebruari 2012.
- [4] <http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/03/08/dilema-budaya-mundur-di-jepang/>, diakses pada 16 februari 2012.
- [5] http://www.kantei.go.jp/foreign/abespeech/2007/09/12press_e.html, diakses pada 23 april 2012
- [6] <http://news.detik.com/read/2007/05/30/143131/787213/10/pm-jepang-tak-hadiri-pemakaman-mentan-yang-gantung-diri>, diakses pada 12 Mei 2012).
- [7] <http://news.detik.com/read/2007/05/30/143131/787213/10/pm-jepang-tak-hadiri-pemakaman-mentan-yang-gantung-diri>, diakses pada 12 Mei 2012).
- [8] <http://www.beritaindonesia.co.id/mancanegara/popularitas-abe-melorot>, diakses pada 12 Mei 2012
- [9] http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/08/070801_japanresigns.shtml, diakses pada 12 Mei 2012
- [10] <http://news.detik.com/read/2007/05/30/143131/787213/10/pm-jepang-tak-hadiri-pemakaman-mentan-yang-gantung-diri>, diakses pada 12 Mei 2012
- [11] <http://www.tempo.co/read/news/2008/09/01/059133260/Yasuo-Fukuda-Perdana-Menteri-Tak-Populer/> diakses 23 Oktober 2012
- [12] http://www.nytimes.com/2008/09/02/world/asia/02japan.html?_r=1 23 oktober 2012
- [13] http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_asia/2009-08-31/855888607232.html 19 Oktober 2012
- [14] <http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/02/japan-prime-minister-yukio-hatoyama-resigns/> diakses 19 Oktober 2012
- [15] <http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/08/27/62784/PM-Jepang-Naoto-Kan-Mundur> diakses 16 februari 2012 jam 13.25
- [16] <http://www.pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses pada 07 Pebruari 2012.